



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 967-974

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perbandingan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Padang Lawas

Moh Alfian Maulana^{1✉}, Eka Yulyana², Lina Aryani³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631180083@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbandingan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten Padang Lawas dan Kepulauan Anambas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik analisis SWOT, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi literature dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi masing-masing yang digunakan oleh Kabupaten Padang Lawas dan Kepulauan Anambas terbukti efektif dalam 3 tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Kata Kunci: *Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah, SWOT*

Abstract

This study analyzes the comparison of strategies to increase Regional Original Revenue between Padang Lawas Regency and Anambas Islands. The type of research used is descriptive qualitative with SWOT analysis techniques, data collection is carried out using literature study methods and document analysis. The results showed that the respective strategies used by Padang Lawas Regency and Anambas Islands have proven effective in the last 3 years, this is evidenced by the increase in local revenue in the last 3 years.

Keywords: *Increase, Regional Original Revenue, SWOT*

PENDAHULUAN

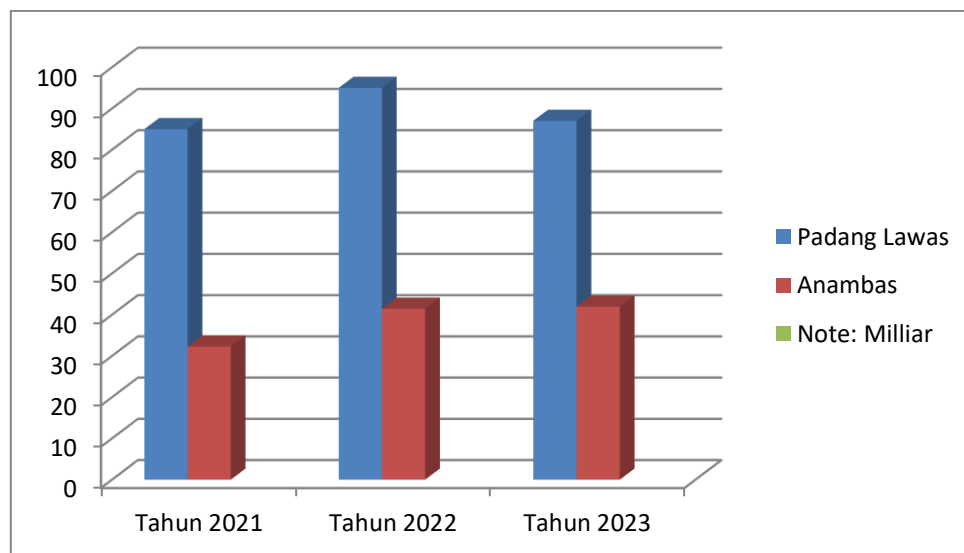
Indonesia adalah negara dengan 34 Provinsi dan 416 Kabupaten, dengan gubernur dan bupati sebagai kepala daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah diberikan hak otonomi yang berarti bahwa masing-masing provinsi memiliki otoritas serta kebebasan guna mengendalikan semua urusan rumah tangga individu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah federal telah memberikan kebebasan serta kewenangan, termasuk hak untuk memperoleh serta menggali sumber daya finansial sehingga bisa mengalokasikan dana bagi seluruh proyek pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan prinsipnya, otonomi daerah merupakan pengalihan wewenang kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat guna mengelola keuangan serta administrasi mereka sendiri. Dalam Pasal 1 Ayat 6 UU No. 23/2014 menyatakan bahwa daerah otonom memiliki hak, kewenangan, serta tanggung jawab guna mengorganisir serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal secara mandiri di dalam struktur negara Republik Indonesia.

Darumurti dan Rauta (2003) berpendapat bahwa pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memberikan manfaat sekaligus beban sehingga memerlukan persiapan yang matang dari daerah untuk menjalankannya, sebab pemerintah daerah dihadapkan pada semakin bertambahnya urusan serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Daerah harus menyusun segala aspek penduduknya yang diperlukan seperti infrastruktur, sumber daya keuangan, serta sumber daya manusia, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ini sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Kaho (2007), yang mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan antara lain faktor penyelenggaraan, faktor keuangan daerah, faktor peralatan, faktor organisasi, serta manajemen untuk mencapai konsistensi antara prinsip-prinsip serta praktik pelaksanaan otonomi daerah. Pencapaian otonomi daerah pada masa depan akan sangat dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut.

Penyelenggaraan otonomi daerah mengacu pada perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan wilayah diamandemenkan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah sentra serta wilayah diamandemenkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Oleh karena itu, dibutuhkan pelaksanaan swatantra daerah bisa meningkatkan kreativitas serta partisipasi masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah melalui pemanfaatan sumber daya serta potensi yang terdapat pada wilayah tersebut.

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber dana guna mendukung pembangunan, melalui konteks tersebut pemerintah pusat memberi kebebasan kepada pemerintah daerah guna mendorong penggalan potensi kekayaan lokal guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Warsito (2001:128) yaitu sumber penghasilan yang berasal dari daerah serta dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber PAD. Sedangkan pendapatan asli daerah menurut Rahman (2005:38) diartikan sebagai pendapatan yang berasal dari pembagian daerah serta hasil perpajakan, hasil manajemen aset daerah yang dipisahkan, serta dari sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah dalam rangka penggalan pendanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai representasi prinsip desentralisasi (Jatmiko & Wicaksono, 2019).



Gambar 1. Grafik PAD Kabupaten Padang Lawas dan Kepulauan Anambas

Tinjauan Pustaka

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan melalui pemberian wewenang yang luas, jelas, nyata, serta akuntabel kepada daerah secara seimbang yang dicapai melalui pemerataan, pengaturan, serta penggunaan sumber daya nasional dalam konteks otonomi daerah dapat terwujud. Prinsip demokrasi, pelibatan masyarakat, kesetaraan, keadilan, dan mengakui keberagaman daerah juga penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pada dasarnya PAD merupakan salah satu elemen terpenting dalam merumuskan APBD, jika pendapatan asli daerah meningkat, APBD juga kemungkinan akan ikut meningkat karena 2 hal ini saling berhubungan. Oleh karenanya perlu suatu upaya yang sudah tersusun secara sistematis untuk meningkatkan sektor sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan daerah yang cukup penting guna mendanai

rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah melalui pajak serta retribusi daerah. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui pemberian wewenang juga dengan memberikan hak serta kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan di Undang-Undang angka 33 Tahun 2008 wacana pembentukan Kepulauan Anambas. Sejak saat itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan cara mandiri sudah dilakukan dengan cara otomatis, disertai dengan sejumlah pendanaan dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan serta memperluas pembangunan secara merata, Kabupaten Kepulauan Anambas bergantung di sumber daya serta pembiayaan, yang berasal dari aturan Pendapatan serta Belanja daerah.

Pajak daerah serta retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung operasional penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan demikian pelaksanaan pemerintahan daerah dapat diselenggarakan melalui pemberian kewenangan yang luas diikuti adanya pemberian hak serta tanggung jawab untuk menjalankan otonomi daerah dalam kerangka sistem pemerintahan negara yang terpadu. Dalam 3 tahun terakhir kedua wilayah yaitu kabupaten padang lawas dan kepulauan anambas mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan model kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan studi kepustakaan dimana peneliti mencari informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta sumber kredibel lainnya dalam menulis penelitian ini. Adapun focus dalam penelitian ini membandingkan 2 wilayah di Indonesia terkait strategi meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing yaitu di daerah Kabupaten kepulauan Anambas dan Kabupaten Padang Lawas. Data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang berasal dari penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen seperti buku, artikel ilmiah yang mendukung dalam pembuatan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity serta Threat, yang perspektif, jika diterjemahkan ke bahasa

Indonesia merujuk pada Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Ancaman (Siregar et al., 2019). Metode analisis SWOT merupakan pendekatan mendasar yang bermanfaat guna memandang suatu topik atau masalah dari empat sudut pandang yang berbeda. Menurut Udan (2005) analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi untuk mengidentifikasi situasi guna menunjukkan apakah suatu keadaan dapat dikelompokkan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman, yang mampu dijelaskan sebagai berikut: a) Strength (Kekuatan) merupakan keadaan internal organisasi yang mencakup kompetensi, kapabilitas, serta sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dan bisa digunakan dalam menghadapi peluang maupun ancaman yang muncul; b) Weakness (Kelemahan) merupakan kondisi internal organisasi berupa kompetensi, kapabilitas, serta sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dan mampu mengatasi kesempatan dan ancaman; c) Opportunity (Peluang) merupakan keadaan eksternal yang membawa manfaat bagi organisasi. Biasanya, organisasi dalam industri yang sama akan merasakan keuntungan dari situasi eksternal tersebut; d) Threat (Ancaman) merupakan kondisi eksternal yang melili potensi menyulitkan organisasi (Siregar et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi alternative untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Padang Lawas dapat diformulasikan melalui pendekatan analisis SWOT. Setelah menganalisis lingkungan internal dan eksternal, analisis matriks SWOT adalah langkah berikutnya yang menggabungkan kekuatan serta kelemahan internal dengan peluang serta ancaman eksternal yang mempengaruhi peningkatan PAD di kedua kabupaten tersebut.

Tabel 1. Matriks SWOT Strategi Peningkatan PAD di Kabupaten Padang Lawas

KAFI	Kekuatan (S) 1. Adanya perda struktur organisasi/SOP; 2. Kualitas sumber daya aparatur;	Kelemahan (W) 1. Kemampuan teknis fungsional; 2. Standarisasi beban kerja; 3. Saran prasarana yang sudah tidak memadai;
KAFE	1. Komitmen karyawan yang tinggi	
Peluang (O) 1. Peran DPKA yang stretegis 2. Kepercayaan pimpinan; 1. Mudah berkoordinasi dengan provinsi pusat;	Strategi (S-O) 1. Peningkatan kompetensi DPKA; 2. Peningkatan eksistensi DPKA; 3. Peningkatan relasi dan wawasan aparatur DPKA;	Strategi (W-O) 1. Tingkatkan volume pendidikan fungsional di DPKA; 2. Meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat.
Tantangan (T) 1. Globalisasi; 2. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa; 3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.	Strategi (S-T) 1. Meningkatkan kinerja aparatur; 2. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait; 3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	Strategi (W-T) 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 2. Meningkatkan budaya kerja koordinasi dengan pemeriksa; 1. 3. Kerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel 2. Matriks SWOT Strategi Peningkatan PAD di Kepulauan Anambas

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah 2. Adanya Perda yang mengatur tentang penerimaan daerah 3. Produktivitas organisasi yang cukup baik 4. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD 5. Adanya tupoksi yang jelas bagi petugas pengelola PAD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya aparatur yang kurang profesional dan belum sesuai dengan latar belakang pendidikan 2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai 3. Keterbatasan data potensi daerah 4. Target belum sepenuhnya berdasarkan potensi yang ada 5. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal
Peluang (O)	Strategi S-O <i>(Aggressive Strategies)</i>	Strategi W-O <i>(Turn Around Strategies)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali 2. Potensi ekonomi daerah 3. Adanya keterlibatan dan kerjasama beberapa instansi dalam penerimaan PAD 4. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Perkembangan jumlah penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (S1,O3,S4,O4) 2. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait (S3,O1,S5,O5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki sistem informasi dan pendokumentasian data wajib pajak daerah (W3,O2,W4,O3) 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAD (W2,O1,W3,O4)
Ancaman (T)	Strategi S-T <i>(Diversification Strategies)</i>	Strategi W-T <i>(Defensive Strategies)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instabilitas keamanan 2. Mutasi dan promosi jabatan terhadap aparatur pengelola pendapatan daerah 3. Tuntutan adanya pelayanan prima 4. Perkembangan politik dan ekonomi 5. Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 	<p>Peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan minimal (S2,T5,S4,T1,T3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu kualitas SDM pengelola PAD (W1,T3,W5,T4) 2. Mengurangi perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD dengan mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD (W1,T2,T3,T4)

SIMPULAN

Temuan dari analisis terhadap studi tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :

1. Peningkatan efisiensi dalam mengelola pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi PAD secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD.
3. Peningkatan mutu layanan melalui penerapan standar minimal layanan.
4. Membentuk jejaring kerjasama dengan instansi-instansi serta lembaga terkait.
5. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan PAD.
6. Memperbaharui sistem informasi serta dokumentasi data dari wajib pajak di tingkat daerah.
7. Menurunkan mobilitas staf yang mengelola PAD melalui pengalokasikan anggaran

untuk meningkatkan kinerja mereka.

Sedangkan strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas yakni sebagai berikut :

1. Memaksimalkan potensi serta pencapaian pendapatan secara optimal.
2. Evaluasi rencana anggaran pendapatan serta belanja daerah guna memastikan pelaksanaan yang sesuai dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Memastikan kebutuhan dalam pelayanan administrasi kantor serta manajemen aset daerah terpenuhi sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang diberikan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Peningkatan system pengelolaan administrasi pendapatan serta pengeluaran daerah.
5. Peningkatan serta perbaikan infrastruktur sebagai dukungan untuk pelayanan yang lebih baik.
6. Peningkatan profesionalisme pegawai sesuai dengan kebutuhan untuk SDM yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 15–24. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22701
- Halim, M. (2018). *Daerah Kabupaten Seluma*. 8, 225–236.
- Jatmiko, B., & Wicaksono, I. G. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR NEGARA (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 157–174. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5580>
- M, N. S. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 37–48. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500>
- Muhammad Fadli Asri, Abdul Jaelani Aris, Sofyan Muhamad, Muhammad Saiful, S. (2021). Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. *Petiturum*, 9(1), 28–40. <https://uit.e-journal.id/JPetiturum>
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*,

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/>

Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf

Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469>

Siregar, A. H., Nasution, M. H. T., & Nasution, I. (2019). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Strategy of Increasing Regional Original Income in Padang Lawas District*. 6(2), 83–87.